

ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN DESA DI KECAMATAN SIMPANG KATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH

Dony Yanuar

Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung
Jl. Merdeka No 4 Pangkal Pinang
dhonibanka@yahoo.co.id

Abstract : *This study aims to analyze and determine financial performance comparisons between villages of Katis Simpang district of Central Bangka regency during period 2010-2012; as well as to analyze and determine the effectiveness of the allocation, management and use of the Village Budget (APBDes) at Simpang Katis District, Central Bangka regency during the same period. This research uses quantitative method. The sample is the local government of Simpang Katis district, Central Bangka regency. The analytical tools used to determine the financial performance comparison of the village are analysis of spending ratio, analysis of spending growth, analysis of expenditure balance, analysis of expenditure efficiency, and analysis of budget allocations in support of the mission of the Rural Development Plan (RPJMDes). The results shows that there are differences and similarities in terms of the management of direct spending, indirect spending, spending on personnel, expenditure growth, expenditure balance, expenditure efficiency, and budget allocations in supporting the mission of the Rural Medium-Term Development Plan (RPJMDes). In general the financial performance of Simpang Katis District, Central Bangka regency, is in the range of good to excellent.*

Keywords : *Financial Performance of local government, APBDes, Financial ratios Analysis*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan perbandingan kinerja keuangan antara desa kabupaten Katis Simpang Kabupaten Bangka Tengah selama periode 2010-2012; serta untuk menganalisis dan menentukan efektivitas alokasi, manajemen dan penggunaan Anggaran Desa (APBDes) di Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah selama periode yang sama. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel adalah pemerintah daerah kabupaten Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Alat analisis yang digunakan untuk menentukan perbandingan kinerja keuangan desa adalah analisis menghabiskan rasio, analisis pertumbuhan belanja, analisis keseimbangan pengeluaran, analisis efisiensi pengeluaran, dan analisis alokasi anggaran dalam mendukung misi Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dan persamaan dalam hal pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja pegawai, pertumbuhan belanja, saldo belanja, efisiensi pengeluaran, dan alokasi anggaran dalam mendukung misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Secara umum kinerja keuangan Simpang Katis Kabupaten, Central Kabupaten Bangka, berada di kisaran baik untuk sangat baik.*

Kata Kunci : *Kinerja Keuangan Daerah, APBDes, Analisis Rasio Keuangan*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangantahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditetapkan dengan peraturan yang telah ada. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka penulis tertarik (1) Untuk menganalisis dan mengetahui komparasi kinerja keuangan desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah selama periode 2010-2012. (2) Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah selama periode 2010-2012.

TUJUAN LITERATUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Nurlan Darise (2009: 366) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 1 angka 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Penyusunan Rancangan APBDes

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

Pelaksanaan APBDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 8 dan juga menurut Nurlan Darise (2009: 368) dalam pelaksanaan APBDes berkaitan dengan pendapatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan khusus bagi desa yang belum

memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah. (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDDes. (3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada point (a) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (4) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. (5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. (8) Pengembalian pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Menurut Nurlan Darise (2009) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 22 ayat 2 Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes dan rancangan keputusan Kepala desa tentang pertanggungjawaban Kepala desa dan menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD.

Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 24, 25 dan 26 Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran alokasi dana dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kinerja Keuangan

Mohamad Mahsun (2006: 25) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas dalam mencapai tujuan.

Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Mohamad Mahsun (2006: 26) menyatakan bahwa elemen pokok pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: (1) a. Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi. Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara *eksplisit*) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara *eksplisit* dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. (2) b. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja. Menurut Mahmudi (2005: 96) indikator kinerja merupakan konsep yang *multidimensional* dan kompleks. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. (3) c. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi. Jika sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja biasanya diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.

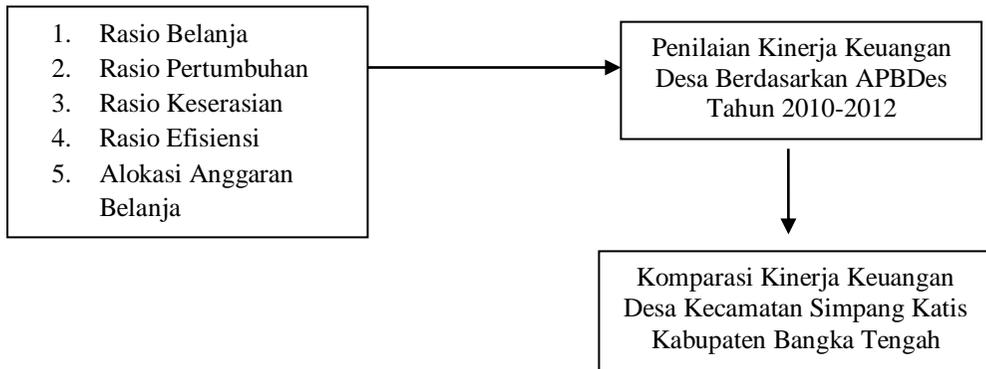
Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja

Menurut Mohamad Mahsun (2006: 31) aspek pengukuran kinerja yaitu: (1) Kelompok masukan (*input*), (2) Kelompok proses (*process*), (3) Kelompok hasil (*outcome*), (4) Kelompok manfaat (*benefit*), (5) Kelompok dampak (*impact*), (6) Kebijakan (*policy*), (7) Perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*), (8) Kualitas (*quality*), (9) Kehematan (*economy*), (10) Keadilan (*equity*), (11) Pertanggungjawaban (*accountability*).

Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja

Menurut Mohamad Mahsun (2006: 25) pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi/pemerintah untuk menilai: (1) Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan. (2) Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan. (3) Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. (4) Menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi. (5) Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif. (6) Mengutamakan alokasi sumber daya.

Kerangka Pemikiran



Sumber: Joko Wahono, 2012 (Modifikasi Peneliti, 2013)

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa penelitian penilaian kinerja keuangan desa dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penilaian tersebut dapat diukur dengan menggunakan analisis Rasio Belanja, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, dan Alokasi Anggaran Belanja. Kemudian melakukan perbandingan bagaimana desa yang satu dengan desa yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada baik dari buku literatur maupun dari sumber-sumber lainnya dan diperoleh langsung dari desa-desa yang ada di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Data sekunder dari desa-desa yang ada di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah tersebut berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa-desa di Kecamatan Simpang Katis tahun 2010-2012.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data kuantitatif yang didapat dari laporan keuangan desa di Kecamatan Simpang Katis. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

Alat analisis atau komponen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal menggunakan analisis rasio belanja.

Rasio Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\% \quad (1)$$

Rasio Belanja Langsung

$$= \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\% \quad (2)$$

Untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ketahun positif atau negatif, menggunakan analisis pertumbuhan belanja.

Analisis Pertumbuhan Belanja

$$= \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times 100\% \quad (3)$$

Untuk mengetahui keserasian belanja pemerintah desa dapat menggunakan analisis keserasian belanja, dalam total belanja jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung dianggap tidak baik, demikian sebaliknya bila belanja langsung lebih tinggi dari persentase belanja tidak langsung, berarti pemerintah desa dalam pengelolaan belanja dianggap baik. Jika Belanja Pegawai >50 % dalam Total Belanja, maka dikatakan anggaran belanja tidak baik, demikian pula sebaliknya jika belanja pegawai <50 % dalam Total Belanja, maka dikatakan anggaran belanja baik.

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap total belanja

$$= \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (4)$$

Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja

$$= \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (5)$$

Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja

$$= \frac{\text{Total Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \quad (6)$$

Untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mengelola belanjanya apakah melakukan efisiensi anggaran atau tidak, dengan menggunakan analisis efisiensi belanja.

Rasio Efisiensi Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad (7)$$

Analisis Alokasi Anggaran Belanja dalam mendukung misi RPJMDes adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mengalokasikan belanja apakah sudah sesuai dengan RPJMDes yang telah disusun, dan berapa besar persentase anggaran belanja yang dialokasikan dari total belanja desa yang ditetapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Belanja

Berdasarkan hasil analisis rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung, bahwa dari tahun 2010-2012 dana yang dimiliki pemerintah desa di Kecamatan Simpang Katis lebih besar dialokasikan untuk belanja langsung, sehingga rasio rata-rata belanja langsung (56%) lebih besar dibandingkan rasio rata-rata belanja tidak langsung (44%). Perhitungan rasio belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung tahun 2010-2012 rata-rata belanja pegawai memberikan kontribusi yang sangat besar (31%). Analisis belanja modal terhadap total belanja rata-rata rasio belanja pada tahun 2010-2012 sebesar (50%).

Analisis Pertumbuhan Belanja

Penyebab dari pertumbuhan belanja yang terkadang persentasenya positif atau negatif dan naik atau turun dari desa-desa ini adalah karena setiap desa kebanyakan lebih mementingkan terlebih dahulu belanja langsungnya dibandingkan dengan belanja tidak langsungnya. Belanja langsung itu berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Analisis Optimalisasi (Keserasian) Belanja

Dengan demikian bahwa penyebab hal ini bisa terjadi karena keserasian (optimalisasi) belanja pada pemerintah desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah prioritas lebih mengutamakan atau mementingkan belanja langsung dan juga belanja pegawai dari pada belanja tidak langsungnya.

Tabel 1. Analisis dan Interpretasi Data Rata-rata Keseluruhan Rasio

	Rasio	Total Rata-rata
Rasio Belanja		
Rasio Belanja Tidak Langsung	44%	50%
Rasio belanja langsung	56%	
Analisis pertumbuhan belanja		
	17%	17%
Rasio Keserasian		
Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	44%	
Rasio belanja langsung terhadap total belanja	56%	44%
Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	31%	
Rasio Efisiensi Belanja		
	84%	84%

Sumber: APBDes di Kecamatan Simpang Katis Tahun 2010-2012 (diolah, Peneliti, 2013)

Analisis Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, pengelolaan belanja pemerintah desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah dapat dikatakan efisiensi, dimana rata-rata rasio efisiensi dari setiap desa pada periode 2010-2012 memberikan kontribusi yaitu sebesar (84%).

Analisis Alokasi Anggaran Belanja Dalam mendukung Misi RPJMDes

Hasil analisis dan evaluasi diketahui bahwa pengalokasian anggaran belanja pemerintah setiap desa di Kecamatan Simpang Katis sudah sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMDes Kabupaten Bangka Tengah dan capaian kinerja sasaran strategis pada umumnya baik sampai dengan baik sekali.

Pembahasan Hasil

Komparasi Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Selama Periode 2010-2012.

Komparasi kinerja keuangan setiap desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah terlihat memiliki rata-rata keseluruhan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Perbandingan (komparasi) terlihat sekali dari setiap desanya walaupun perbandingan itu tidak begitu jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Rasio APBDes Sepuluh Desa Di Kecamatan Simpang katis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2012

Simpang katis		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	35%	52%	35%	41%
	Rasio belanja langsung	65%	48%	65%	59%
Analisis pertumbuhan belanja		55%	-27%	45%	24%
Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	35%	52%	35%	41%
	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	65%	48%	65%	59%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	26%	44%	27%	32%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	59%	68%	76%
Beruas		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	43%	32%	46%	40%
	Rasio belanja langsung	57%	68%	54%	60%
Analisis pertumbuhan belanja		66%	2%	3%	24%
Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	43%	32%	46%	40%
	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	57%	68%	54%	60%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	28%	26%	20%	24%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	49%	66%	71%
Teru		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	42%	36%	43%	40%
	Rasio belanja langsung	58%	64%	57%	60%
Analisis pertumbuhan belanja		44%	5%	-6%	14%
Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	42%	36%	43%	40%

	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	58%	64%	57%	60%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	25%	29%	23%	26%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	78%	87%	89%
Pasir Garam		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	42%	52%	45%	46%
	Rasio belanja langsung	58%	48%	55%	54%
Analisis pertumbuhan belanja		18%	-7%	25%	12%
Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	42%	52%	45%	46%
	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	58%	48%	55%	54%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	26%	43%	23%	31%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	100%	84%	95%
Terak		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	35%	42%	40%	39%
	Rasio belanja langsung	65%	58%	60%	61%
Analisis pertumbuhan belanja		55%	9%	16%	27%
Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	35%	42%	40%	39%
	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	65%	58%	60%	61%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	23%	35%	20%	26%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	58%	62%	73%
Katis		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	33%	40%	44%	39%
	Rasio belanja langsung	67%	60%	56%	61%
Analisis pertumbuhan belanja		71%	-28%	16%	20%

Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	33%	40%	44%	39%
	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	67%	60%	56%	61%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	20%	34%	25%	26%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	77%	81%	86%
Puput		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	54%	42%	39%	45%
	Rasio belanja langsung	46%	58%	61%	55%
Analisis pertumbuhan belanja		27%	12%	18%	19%
Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	54%	42%	39%	45%
	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	46%	58%	61%	55%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	34%	34%	22%	30%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	81%	83%	88%
Pinang Sebatang		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	80%	45%	33%	52%
	Rasio belanja langsung	20%	55%	67%	48%
Analisis pertumbuhan belanja		-31%	77%	9%	18%
Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	80%	45%	33%	52%
	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	20%	55%	67%	48%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	60%	38%	26%	42%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	81%	57%	80%
Celuak		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	42%	52%	36%	44%
	Rasio belanja langsung	58%	48%	64%	56%

Analisis pertumbuhan belanja		30%	-12%	11%	10%
Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	42%	52%	36%	44%
	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	58%	48%	64%	56%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	37%	44%	28%	37%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	87%	91%	93%
Sungkap		2010	2011	2012	Rata-rata
Rasio Belanja	Rasio belanja tidak langsung	56%	54%	42%	51%
	Rasio belanja langsung	44%	46%	58%	49%
Analisis pertumbuhan belanja		0,91 %	6%	1%	2,74%
Rasio Keserasian	Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja	56%	54%	42%	51%
	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	44%	46%	58%	49%
	Rasio belanja pegawai terhadap total belanja	33%	45%	45%	41%
Rasio Efisiensi Belanja		100%	96%	70%	89%

Efektivitas Pengalokasian, Pengelolaan, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Selama Periode 2010-2012.

Implementasi dari pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menyerap anggaran secara optimal, yang dimaksud optimal disini adalah penggunaan serta pengalokasian dalam pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengelola anggaran mendekati 100 %. Dengan menggunakan analisis keserasian belanja, dapat dilihat bagaimana Pemerintah desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah mengalokasikan anggarannya. Alokasi anggaran yang dimaksud adalah belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Berdasarkan hasil analisis rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung, bahwa dari tahun 2010-2012 dana yang dimiliki pemerintah desa di Kecamatan Simpang Katis lebih besar dialokasikan untuk belanja langsung, sehingga rasio rata-rata belanja langsung sebesar (56%) lebih besar dibandingkan rasio rata-rata belanja tidak langsung yaitu (44%). Analisis

belanja modal terhadap total belanja rata-rata rasio belanja pada tahun 2010-2012 sebesar (50%).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Rasio rata-rata belanja tidak langsung setiap desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah ada yang lebih besar dibandingkan dengan rasio rata-rata belanja langsung .(2) Persentase pertumbuhan belanja tidak langsung pada setiap desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2010-2012 ada yang mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan karena adanya pengurangan anggaran belanja tidak langsung, sedangkan persentase pertumbuhan belanja langsung ada yang meningkat. (3) Pemerintah desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2010-2012 ada yang dianggap tidak baik dan ada yang dianggap baik sampai dengan baik sekali dalam pengalokasian anggarannya, karena terkadang belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung, sehingga tidak optimal. (4) Untuk rasio efisiensi belanja, pemerintah desa di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi yaitu pada tahun 2010-2012 rata-rata rasio efisiensi berada dibawah 100% .

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*(Edisi Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada SKPD dan BLU* (Edisi Kedua). Jakarta: PT Indeks.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 *tentang Pedoman Pengurusan , Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan daerah sertatata cara penyusunan anggaran pendapat dan belanja daerah, pelaksana tata usaha keuangandaerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah*.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah*.
- Peraturan Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2010 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010*.
- Peraturan Pemerintah Desa Nomor 1 Tahun 2010 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Setyoko, Paulus Israwan. (2011). "Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)". Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 11. No. 1, Hal. 14 – 24, 2011.

Sukasmanto. (2004). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.